

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1. Latar Belakang Masalah**

Dalam beberapa penelitian sebelumnya, akses ke lembaga jasa keuangan formal ditemukan menjadi salah satu kendala terbesar bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Menurut Rosengard dan Prasetyantoko (2011), mayoritas pembiayaan yang disalurkan oleh bank-bank besar Indonesia menargetkan perusahaan besar daripada UMKM. Sehingga, pengusaha UMKM sering mengeluh semakin sulitnya mereka mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan untuk kebutuhan bisnis.

Dalam perkembangan terakhir, jika dibandingkan dengan perbankan konvensional, kinerja sektor perbankan syariah belakangan ini mengalami penurunan. Hal tersebut dapat dilihat, misalnya, tingkat pembiayaan yang tidak terorganisir relatif tinggi. Atau pengukuran kinerja yang kurang efektif dibandingkan perbankan konvensional. Faktor pendukung yang memungkinkan perbankan syariah untuk terus berkembang dan beroperasi dengan baik belum disediakan untuk keberadaan bank syariah di Indonesia.

Pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia terhambat oleh beberapa faktor, antara lain: sumber daya yang dimiliki manusia kurang terlatih dalam pengembangan budaya dan pengelolaan sumber daya manusia; kewirausahaan masyarakat kita,

yang masih dalam masa pertumbuhan dan relatif tidak signifikan; permodalan (dana); terdapat ambivalensi antara manajemen bank syariah dan praktik industri; kepercayaan umat Islam masih rendah, dan secara akademis tidak dirumuskan secara sempurna untuk pengembangan lembaga keuangan syariah yang sistematis dan proporsional. Dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional, kepercayaan masyarakat mengenai keberadaan bank syariah dipengaruhi oleh kompleksitas permasalahan tersebut (Rusydiana,2016).

Salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat oleh negara melalui institusi perbankan syariah adalah dengan cara menyediakan modal untuk masyarakat menengah ke bawah dalam bentuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Menurut Ananda dan Dwi (2017), usaha mikro, kecil, dan menengah dianggap mampu memberikan kontribusi bagi perekonomian Indonesia. Pada tahun 2018, ada 64,2 juta pengusaha UMKM, atau 99,99% dari pengusaha Indonesia, menurut Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM). UMKM memiliki daya serap tenaga kerja sebesar 117 juta karyawan, atau 97% dari kapasitas penyerapan tenaga kerja perusahaan. Sebaliknya, usaha mikro, kecil, dan menengah menyumbang 61,1% dari perekonomian negara (PDB), dan sisanya sebesar 38,9% merupakan pangsa perusahaan besar, yang hanya terdiri dari 5.550 atau 0,01% dari total pengusaha (Nainggolan, 2021).

Dewasa ini, bentuk pembiayaan usaha mikro jauh lebih spesifik, misalnya sampai menyentuh kepada isu gender. Yang di maksud tentang isu gender adalah dimana pihak bank mengkhhususkan alokasi dana bagi ibu rumah tangga. Karena tidak terjangkaunya atau sulitnya akses perempuan ke industri perbankan, di mana perempuan kekurangan sumber daya keuangan (uang atau pendapatan). Kebijakan seperti ini adalah hal baru dimana sebelumnya akses pembiayaan hanya bisa didapatkan oleh pria. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah, juga dikenal sebagai BTPN Syariah, merupakan salah satu dari sekian banyak lembaga keuangan yang dianggap mampu membantu pemberdayaan masyarakat, khususnya perempuan.

Bank Umum Syariah yang ke-12 di Indonesia adalah BTPN Syariah. Bank ini terbentuk atas konversi PT. Bank Purbadanarta (Bank Sahabat) dan *spin-off* Unit Usaha Syariah PT. BTPN Tbk. Berdasarkan Keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tanggal 22 Mei 2014, BTPN Tbk. dikonversi menjadi BTPN Syariah. Program Paket Masa Depan adalah salah satu produk unggulan BTPN Syariah. Pembiayaan Paket Masa Depan menggunakan akad wakalah wal murabahah yang mencakup pembiayaan, tabungan wadiah, asuransi jiwa bagi nasabah paket masa depan, dan santunan suami nasabah apabila meninggal dunia (Rismayani, 2015).

BTPN Syariah KC Kendari telah beroperasi sejak tahun 2014, sebagai lokasi pemberdayaan simpan pinjam melalui program Paket Masa Depan. Pemberdayaan perempuan yang dilakukan

BTPN Syariah KC Kendari melibatkan penyediaan pembiayaan bagi perempuan sebagai modal bisnis sehingga mereka dapat memulai usaha dengan harapan dapat meningkatkan keterampilan dan pendapatan keluarga.

Nasabah yang akan menerima pembiayaan dibagi dalam beberapa kelompok, dengan minimal 10 dan maksimal 30 orang pada setiap kelompok/sentra. Dalam satu tahun pembayaran, dana pinjaman mulai dari 2 sampai 5 juta rupiah diberikan kepada nasabah pada tahap awal pembiayaan.

Salah satu *Community Officer* (Ketua Sentra) pada BTPN Syariah KC Kendari sedikitnya memegang sekitar 10-15 kelompok/sentra, dalam penelitian ini penulis mengambil sampel dari dua kelompok di Desa Sindangkasih, dengan masing-masing kelompok terdiri dari 20 dan 18 anggota. Jumlah pencairan dana untuk modal usaha dalam sekali pencairan dirangkum dalam tabel berikut:

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Pencairan Dana Pada Kelompok/Sentra Di Desa Sindangkasih**

No.	Nama Kelompok	Nama Ketua	Jumlah Anggota	Jumlah Pencairan Dana
1	Kelompok 1	Een Rosita	20	Rp.100.000.000
2	Kelompok 2	Romlah	18	Rp.80.000.000

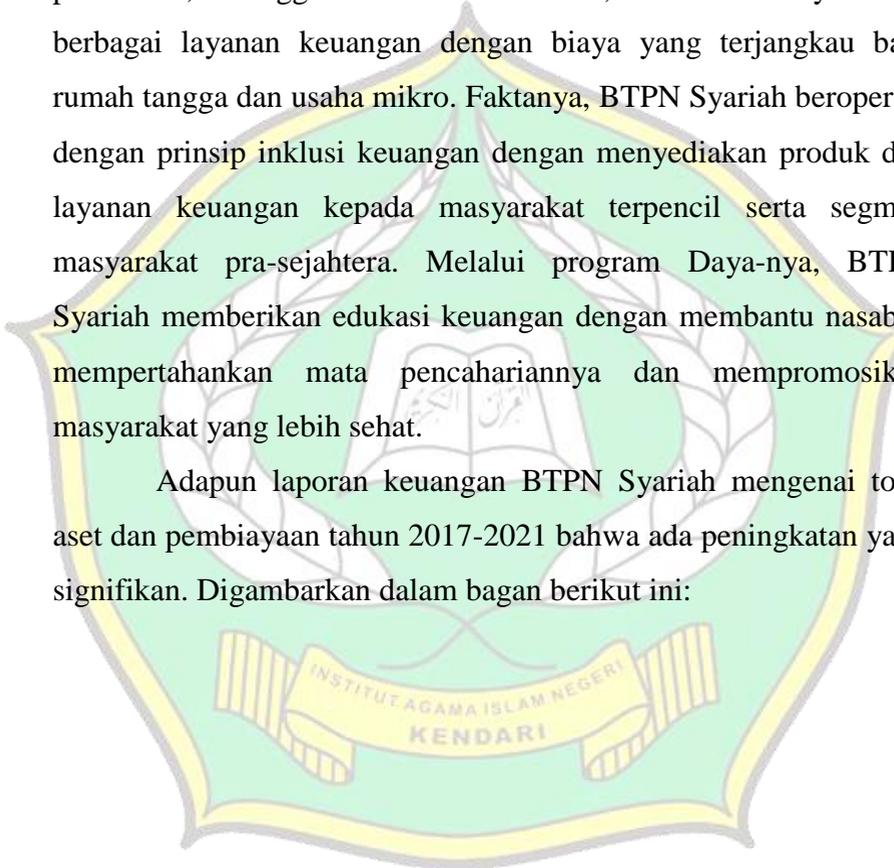
*Sumber:* Data Olahan Hasil Penelitian, 2022

Berdasarkan tabel di atas, BTPN Syariah dapat melakukan pencairan dana sebesar Rp.80.000.000-Rp.100.000.000 dalam sekali pencairan pada suatu kelompok/sentra yang terdiri dari 18-20

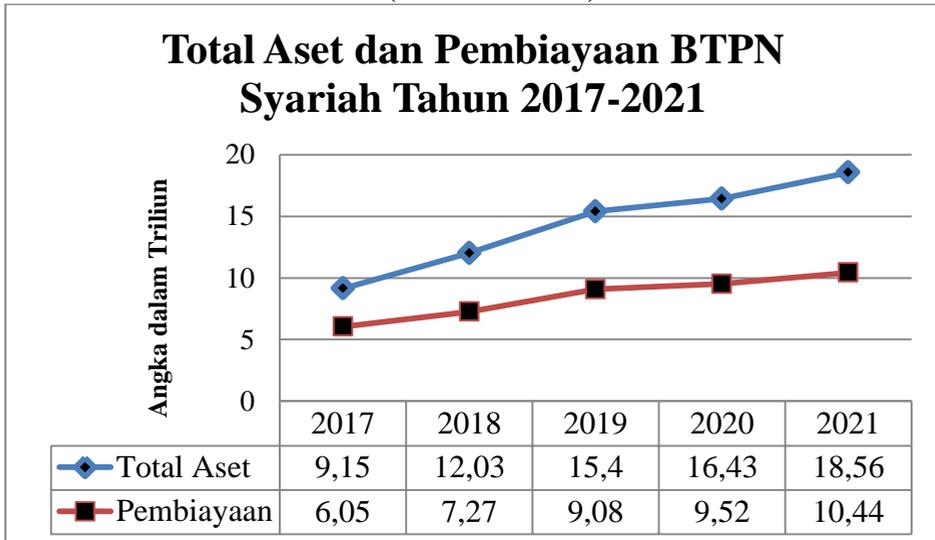
nasabah. Namun, besaran dana pencairan bervariasi tergantung jenis usaha yang dimiliki nasabah.

Secara teori, inklusi keuangan bertujuan untuk mendorong masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akses ke layanan perbankan, sehingga bisa memiliki akses, termasuk menyediakan berbagai layanan keuangan dengan biaya yang terjangkau bagi rumah tangga dan usaha mikro. Faktanya, BTPN Syariah beroperasi dengan prinsip inklusi keuangan dengan menyediakan produk dan layanan keuangan kepada masyarakat terpencil serta segmen masyarakat pra-sejahtera. Melalui program Daya-nya, BTPN Syariah memberikan edukasi keuangan dengan membantu nasabah mempertahankan mata pencahariannya dan mempromosikan masyarakat yang lebih sehat.

Adapun laporan keuangan BTPN Syariah mengenai total aset dan pembiayaan tahun 2017-2021 bahwa ada peningkatan yang signifikan. Digambarkan dalam bagan berikut ini:



**Gambar 1.1**  
**Total Aset dan Pembiayaan BTPN Syariah Tahun 2017-2021**  
 (dalam Triliun)



*Sumber:* Laporan Keuangan BTPN Syariah, 2022

Berdasarkan bagan di atas, dari tahun 2017 hingga 2021, data laporan keuangan menunjukkan bahwa total aset dan pembiayaan mengalami peningkatan. Total aset BTPN Syariah pada tahun 2017 mencapai Rp.9,15 Triliun dan meningkat 31,4% menjadi sebesar Rp.12,03 Triliun. Pada tahun 2019, meningkat menjadi Rp.15,4 Triliun atau 28%. Selanjutnya pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp.16,43 Triliun. Dan pada tahun 2021, total aset meningkat sebesar Rp.18,56 Triliun.

Diwaktu yang sama, besaran jumlah pembiayaan dipengaruhi oleh kenaikan aset BTPN Syariah. Pada tahun 2017 dan 2018, jumlah pembiayaan meningkat sebesar 20,03%, dan pada

tahun 2019 meningkat sebesar 24%. Akhir tahun 2020 hingga 2021 terdapat tren peningkatan mencapai 4,8% pada tahun 2020 dan 9,6% pada akhir tahun 2021.

Menurut Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM), melaporkan bahwa jumlah pelaku usaha di Indonesia terus meningkat. Disamping itu, jumlah pengusaha perempuan di Indonesia mengalami peningkatan, begitu pula jumlah pengusaha secara keseluruhan. *Global Entrepreneurship Monitor* melakukan riset, bahwa 14% penduduk Indonesia terdiri dari perempuan pengusaha (*womenpreneur*) (Pikiran Rakyat.com, 2021). Hal ini didukung oleh penelitian Kusnandar (2018) yang menemukan bahwa keterampilan kewirausahaan wanita tidak kalah dengan laki-laki. Oleh karena itu, pengusaha perempuan memerlukan bantuan modal untuk pengembangan usaha.

Sebenarnya, sudah menjadi kewajiban suami sebagai kepala keluarga untuk mencari nafkah. Namun, istri mempunyai hak untuk mencari nafkah tanpa melupakan kewajiban seorang istri serta ibu rumah tangga. Sehingga banyak istri pada akhirnya menopang kebutuhan keluarganya. Secara teoritis, pemberdayaan perempuan adalah upaya sistematis dan terencana untuk meningkatkan produktifitas, martabat serta status masyarakat dengan memberikan peran dan kesempatan yang setara dengan laki-laki serta melibatkan perempuan dalam integritas termasuk rencana pembangunan. Sehingga, perempuan dan laki-laki setara dalam menuntut ilmu atau mencari nafkah.

Istri membantu suami dalam mencari nafkah dengan berbagai alasan, diantaranya karena keinginan untuk menopang perekonomian keluarga yang kurang mampu untuk bertahan hidup jika hanya mengandalkan penghasilan suami. Islam sendiri membolehkan seorang istri bekerja selama mampu menjaga diri, menjaga sopan santun serta berpegang teguh pada syariat, bekerja sesuai karakternya dengan tidak mengabaikan keluarganya. Meskipun penghasilan istri lebih tinggi, suami tidak boleh semena-mena ketika dia melihat bahwa istrinya berkontribusi pada kesejahteraan finansial keluarga. Adalah dosa besar jika mengabaikan istri dan keluarga tanpa memberikan alasan apapun (Orami.com, 2021).

Satu-satunya bank di Indonesia yang melayani keluarga prasejahtera produktif (*unbankable*) adalah BTPN Syariah. *Untuk melayani nasabah perempuan di pedesaan bank mengembangkan strategi jemput bola. Perusahaan melayani keluarga kurang mampu secara ekonomi, terutama perempuan karena suatu alasan.* Salah satunya adalah sumber keuangan perempuan dapat dialihkan untuk menghidupi keluarga mereka. Nasabah BTPN Syariah yang menerima pembiayaan Paket Masa Depan selalu dapat mengembalikan pinjamannya, serta berkontribusi pada perekonomian keluarga (Republika, 2019).

Beberapa kajian tentang upaya negara memberdayakan perempuan melalui lembaga keuangan telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Hanindya (2020), melakukan penelitian tentang peran

pembiayaan Paket Masa Depan terhadap perekonomian keluarga dalam pemberdayaan perempuan pada BTPN Syariah KC Banda Aceh. Berdasarkan hasil temuan, BTPN Syariah telah membantu perempuan kurang mampu dalam mencari modal usaha.

Layyinaturrobaniyah (2019), melakukan penelitian tentang pengaruh lembaga keuangan mikro dan pemberdayaan perempuan terhadap tingkat kemiskinan pada Orang terkena Dampak di daerah sekitar pembangunan Waduk Jatigede, Sumedang. Hasil temuan menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan dan lembaga keuangan mikro secara simultan berdampak positif dan signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan serta peningkatan pendapatan keluarga, khususnya bagi masyarakat OTD.

Siregar (2019), melakukan penelitian tentang pengaruh dari pembiayaan Paket Masa Depan BTPN Syariah terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat prasejahtera di Kecamatan Kampar. Berdasarkan temuan penelitian, pembiayaan Paket Masa Depan BTPN Syariah berpengaruh terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat nasabah yang kurang mampu secara ekonomi, sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat maupun modal usaha.

Sekalipun telah banyak penelitian tentang pemberdayaan perempuan, perbankan syariah, dan UMKM namun belum banyak penelitian tentang bagaimana ketiganya saling berkaitan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan di Desa Sindangkasih. Mengapa Desa Sindangkasih bisa menjadi lebih spesifik, karena di Desa

Sindangkasih banyak perempuan yang berusaha secara mandiri, misalnya penjual sayur, penjual bawang, penjual gorengan, penjual baju, penjual somay dan lain sebagainya. Perempuan-perempuan di Desa Sindangkasih memiliki etos kerja yang tinggi, memiliki kecenderungan usaha yang baik. Tetapi, mereka terbatas pada permodalan. Di sinilah letak pembaruan penelitian ini yaitu ingin melihat bagaimana peranan BTPN Syariah terhadap perkembangan usaha mikro ibu rumah tangga di Desa Sindangkasih. Maka penelitian ini akan menggunakan teori pemberdayaan dan inklusi keuangan.

Dari uraian latar belakang tersebut, maka penulis akan melakukan suatu penelitian dengan judul *“Optimalisasi Peran BTPN Syariah Dalam Mengembangkan Usaha Mikro Ibu Rumah Tangga Melalui Program Paket Masa Depan (PMD) Di Desa Sindangkasih Kabupaten Konawe Selatan”*.

## **1.2. Fokus Penelitian**

Penulis memberikan batasan pada penelitian ini agar tidak terlalu meluas dan lebih fokus. Dalam hal ini, batasan-batasan tersebut berfokus pada isu-isu yang berkaitan dengan peran BTPN Syariah dalam mengembangkan usaha mikro ibu rumah tangga melalui program Paket Masa Depan di Desa Sindangkasih Kabupaten Konawe Selatan.

### 1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pengajuan pembiayaan Paket Masa Depan pada BTPN Syariah KC Kendari?
2. Bagaimana perkembangan usaha mikro ibu rumah tangga sebelum dan setelah menerima pembiayaan Paket Masa Depan pada BTPN Syariah KC Kendari di Desa Sindangkasih?

### 1.4. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui prosedur pengajuan pembiayaan Paket Masa Depan pada BTPN Syariah KC Kendari.
2. Untuk mengetahui perkembangan usaha mikro ibu rumah tangga sebelum dan setelah menerima pembiayaan Paket Masa Depan pada BTPN Syariah KC Kendari di Desa Sindangkasih.

### 1.5. Manfaat Penelitian

#### 1.5.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya:

1. Menambah sumber pengetahuan mengenai optimalisasi peran BTPN Syariah dalam mengembangkan usaha mikro ibu rumah tangga melalui program Paket Masa Depan.
2. Sumber informasi bagi penelitian sejenis pada masa yang akan datang.

### 1.5.2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat: memberikan pengetahuan mengenai peran BTPN Syariah dalam mengembangkan usaha mikro ibu rumah tangga melalui program Paket Masa Depan.
2. Bagi BTPN Syariah: Sebagai bentuk evaluasi BTPN Syariah untuk meningkatkan perannya dalam pengembangan usaha mikro ibu rumah tangga melalui program Paket Masa Depan dalam rangka mendorong ekspansi sektor perbankan syariah yang lebih besar di masa depan.
3. Bagi peneliti: Menambah pengetahuan mengenai peran BTPN Syariah dalam mengembangkan usaha mikro ibu rumah tangga melalui program Paket Masa Depan sehingga memberikan wawasan bagi peneliti selaku kalangan akademisi untuk ikut aktif terlibat dalam mensosialisasikan serta mengedukasikan kepada publik tentang lembaga keuangan syariah, khususnya BTPN Syariah.

## 1.6. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini digunakan untuk menghindari kekeliruan dalam penafsiran.

1. Optimalisasi dapat didefinisikan sebagai upaya yang dilakukan secara efektif dan efisien, atau dapat didefinisikan sebagai proses menemukan solusi terbaik. Tidak selalu keuntungan tertinggi yang dapat dicapai jika tujuan optimalisasi adalah untuk memaksimalkan keuntungan atau mendapatkan biaya.
2. Peran adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam suatu lembaga/organisasi. Peran yang harus dipenuhi oleh otoritas/organisasi biasanya diatur dengan peraturan, yang merupakan tugas dari otoritas. Peran adalah sikap atau tindakan yang diharapkan oleh sejumlah besar orang atau kelompok dari seseorang dalam status atau posisi tertentu.
3. Perbankan Syariah meliputi seluruh aspek Bank Syariah dan Badan Usaha Syariah, termasuk kelembagaan, operasional bisnis, serta metode dan prosedur operasional bisnisnya.
4. Usaha Mikro adalah kegiatan ekonomi usaha kecil, bersifat tradisional dan informal dalam arti belum tercatat, belum terdaftar dan belum berbadan hukum. Usaha mikro adalah usaha produktif yang dijalankan oleh satu orang atau keluarga dan memiliki tingkat penjualan tahunan maksimum Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) setiap tahunnya.
5. Menurut definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ibu Rumah Tangga adalah seorang wanita yang mengawasi, mengontrol

dan melakukan berbagai tugas rumah tangga. Karena ibu rumah tangga termasuk dalam kategori tidak bekerja di kantor.

6. Program Paket Masa Depan adalah pembiayaan yang menggunakan akad murabahah bil wakalah, meliputi pembiayaan, tabungan wadiah, asuransi jiwa bagi nasabah paket masa depan, dan santunan suami nasabah apabila meninggal dunia. Program Paket Masa Depan diperuntukan bagi ibu-ibu yang ingin mengembangkan atau memulai usaha.

### **1.7. Sistematika Pembahasan**

Susunan dan sistematika penulisan berikut ini telah disusun untuk memudahkan penulis dalam mempersiapkan skripsi dan memahaminya, sehingga penelitian ini dapat berjalan sesuai dengan pengaturan yang telah ditentukan sebelumnya.

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan.

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tentang penelitian terdahulu yang relevan, dan teori yang berkaitan dengan penelitian.

#### **BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang metode, pendekatan penelitian, jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, data dan sumber data,

teknik pengumpulan data, teknik analisis data serta teknik pemeriksaan keabsahan data.

#### BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian, deskripsi informan, hasil penelitian dan pembahasan.

#### BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan, saran dan limitasi penelitian.

